

## **BAB III**

### **PERSATUAN UMMAT ISLAM Tahun 1952-1962**

#### **A. Perkembangan Persatuan Ummat Islam**

Pada tahun 1911 K.H. Abdul Halim pulang dari Mekkah, pergerakan nasional mulai tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintahan Hindia Belanda. Dengan berbekal semangat juang dan tekad yang kuat sekembali dari Mekkah, ia mulai melakukan perbaikan untuk mengangkat derajat masyarakat.<sup>1</sup> K.H. Abdul Halim juga mulai memikirkan kondisi masyarakat kolonial yang tidak seimbang sehingga berusaha untuk memperbaikinya. Sebagaimana lazimnya para ulama yang baru menyelesaikan studinya, K.H. Abdul Halim pun mulai melaksanakan kegiatan dakwahnya. Ia memang tidak langsung mendirikan pesantren, tetapi melakukannya dalam suatu pengajian kecil-kecilan dengan peserta yang sangat terbatas. Meskipun pengajian itu hanya dihadiri oleh segelintir orang, namun kondisi itu tidak membuat K.H. Abdul Halim berkecil hati. Ia terus-menerus menyelenggarakan pengajian secara rutin, yang untuk masa sekarang mungkin bisa disamakan dengan majelis taklim.<sup>2</sup>

##### **a. Hayatul Qulub**

K.H. Abdul Halim melihat bahwa persatuan atau *ukhuwah islamiyyah*-nya masih begitu rendah. Saling membantu di antara

---

<sup>1</sup> Hafizh Anshari dkk, *Ensiklopedia Islam 1*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), p. 13.

<sup>2</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, (Jawa Barat: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008), p. 29-30.

mereka masih begitu kurang, sehingga para pedagang Muslim itu tidak mampu bersaing dengan para pedagang Cina. Dengan kondisi seperti itu, K.H. Abdul Halim tergerak hatinya untuk mengubah keadaan masyarakatnya. Tidak dengan cara memberikan kucuran dana kepada para pedagang, tetapi dengan cara membangun dan membina semangat saling membantu di antara para pedagang Muslim.<sup>3</sup> Setelah enam bulan dari Mekkah, K.H. Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang ia beri nama *Hayatul Qulub* yang bergerak baik di bidang ekonomi maupun bidang pendidikan. Anggota-anggotanya mulanya enam puluh orang, umumnya terdiri dari pedagang dan petani. Mereka membayar iuran masuk sepuluh sen dan iuran mingguan lima sen yang dimaksudkan sebagai suatu dana untuk mendirikan sebuah perusahaan tenun. Organisasi ini juga bermaksud untuk membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina.<sup>4</sup>

Dalam bidang pendidikan K.H. Abdul Halim mulanya menyelenggarakan pelajaran agama sekali seminggu untuk orang-orang dewasa, yang diikuti kira-kira 40 orang. Umumnya pelajaran yang ia berikan adalah pelajaran-pelajaran fiqh dan hadist. Ketika itu K.H. Abdul Halim tidak semata-mata mengajar saja kerjanya, tetapi juga bergerak di bidang perdagangan untuk memenuhi nafkah hidupnya. *Hayatul Qulub* tidak berlangsung lama, persaingan dengan para pedagang Cina yang kadang-kadang menyebabkan perkelahian (perang mulut serta juga secara fisik), dianggap pemerintah sebagai penyebab

---

<sup>3</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 30-31.

<sup>4</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1982), p. 81.

kerusuhan.<sup>5</sup> Konflik itu sendiri sebenarnya lebih disebabkan oleh sikap superioritas etnis Cina terhadap penduduk pribumi, sebagai dampak dari keberhasilan Revolusi Cina Tahun 1911. Pemerintah Hindia Belanda menuduh *Hayatul Qulub* penyebab konflik tersebut. Tuduhan itulah yang mendorong Pemerintah Hindia Belanda membubarkan dan melarang *Hayatul Qulub* berkembang di Majalengka sekitar tahun 1915.<sup>6</sup> Pada tahun 1915 organisasi tersebut dilarang setelah tiga atau empat tahun bergerak. Tetapi kegiatan-kegiatan *Hayatul Qulub* terus dilanjutkan walau tidak diberi nama resmi, termasuk kegiatan di bidang ekonomi. Tetapi kegiatan pendidikan dilanjutkan oleh sebuah organisasi yang disebut *Majlisul Ilmi*.<sup>7</sup>

#### b. Majlisul Ilmi

Menurut Wanta ketika *Hayatul Qulub* dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, kegiatan pengajian itu dipindahkan ke *Majlisul Ilmi*. *Majlisul Ilmi* merupakan organisasi yang didirikan oleh K.H. Abdul Halim sekitar tahun 1912 dengan tujuan memberikan pengajaran agama Islam kepada anak-anak dan remaja.<sup>8</sup> Untuk melaksanakan kegiatan belajar, para santri di lembaga *Majlisul Ilmi* yang didirikannya K.H. Abdul Halim membangun sebuah langgar yang panjang dan lebarnya tidak lebih 8 m (2 x 4 m) dan bertiang bambu di atas tanah milik Sawat di tepi sungai kecil Citangkurak dengan bahan dasar bambu dan beratap ilalang. Di tempat inilah ada tujuh orang anak yaitu Moh. Syafari, Ahmad Syatori, Ahmad Zuhri, Abdul Fatah,

---

<sup>5</sup> Hafizh Anshari dkk, *Ensiklopedia Islam 1...*, p. 13.

<sup>6</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 34.

<sup>7</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia...*, p. 81.

<sup>8</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 35.

Jamaludin, M. Kosim, dan M. Adnan belajar membaca Alquran dan kitab-kitab klasik kepada K.H. Abdul Halim.<sup>9</sup> Sekaligus juga K.H. Moh. Ilyas, mertuanya bertindak sebagai pengajar dalam upaya membantu mensukseskan misi K.H. Abdul Halim. Walaupun surau yang dibuat K.H. Abdul Halim sangat sederhana, namun dengan kesederhanaan tersebut ternyata dengan pelan namun pasti eksistensi *Majlisul Ilmi* makin berkembang pesat sehingga pada akhirnya K.H. Abdul Halim membangun sebuah asrama untuk para santrinya.<sup>10</sup>

Pada tahun 1916, para penghulu, ulama, dan guru agama Majalengka memandang bahwa sudah saatnya sistem pendidikan yang sudah berkembang di Majalengka diperbaharui. Dalam suatu kesempatan K.H. Abdul Halim pun mengutarakan keberadaan *Majlisul Ilmi* kepada mereka. Selain itu, K.H. Abdul Halim menjelaskan rencana mengembangkan *Majlisul Ilmi* menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih besar lagi. Keinginan itu tidak mungkin dapat diwujudkan kalau tidak memiliki sebuah organisasi yang memayunginya. Oleh karena itu, langkah paling awal harus dibentuk dahulu sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.<sup>11</sup>

Penuturan K.H. Abdul Halim itu direspons positif dan rencana serta keinginan tersebut sampai juga ke telinga K.H. Moh. Ilyas, Hoofdpenghulu Landraad Majalengka yang tiada lain mertuanya sendiri. K.H. Moh. Ilyas kemudian mengundang K.H. Abdul Halim, K.H. Djubaedi, K.H. Mas Hidayat, Mas Setya Sentana, Habib Abdullah

---

<sup>9</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*, (Jawa Barat: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2014), p. 68.

<sup>10</sup> Momon Lentuk, *Mengenang Perjuangan dan Kepahlawanan K.H. Abdul Halim*, (Jawa Barat: Mitra pemuda, 2016), p. 48.

<sup>11</sup> Momon Lentuk, *Mengenang Perjuangan dan Kepahlawanan K.H. Abdul Halim...*, p. 48.

Al-Djufri, R. Sastrakusuma, dan R. Acung Sahlan ruangannya di Kantor Penghulu Landraad Majalengka untuk membicarakan rencana mewujudkan keinginan tersebut. Pertemuan itu berhasil mencapai kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi yang mengelola lembaga pendidikan. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa organisasi yang akan didirikan akan berbentuk perkumpulan (*jum'iyah*) yang bermaksud memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, mereka kemudian sepakat menamakan perkumpulan itu dengan nama *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin* (Perkumpulan Pertolongan Untuk Pelajar). Atas bantuan K.H. Moh Ilyas, dibangunlah sebuah mushola dan tiga buah bangunan untuk madrasah.<sup>12</sup>

#### c. *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin*

Pada tanggal 16 Mei 1916 K.H. Abdul Halim mendirikan *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin* sebagai upaya untuk terus mengembangkan bidang pendidikan. *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin* diasuh oleh enam orang guru, yaitu K.H. Abdul Halim, Soleh, Asj'ari, Bunjamin, Abhari, dan Abdurrahman. Para guru agama di Majalengka pada awalnya menyambut dengan baik kehadiran *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin*, namun kemudian berubah menjadi tidak menyukai. Ketidaksukaan mereka disebabkan oleh keputusan K.H. Abdul Halim untuk memasukkan sistem kelas elite dalam sistem pendidikan yang akan dikembangkan oleh *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin*. Sistem halaqah tidak ditinggalkan oleh K.H. Abdul Halim, tetap diterapkan

---

<sup>12</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 36-37.

sebagai metode pengajaran bagi para santrinya.<sup>13</sup> Bagi kalangan tradisional, sistem kelas ditolak sebagai bagian dari sistem pendidikan di pesantren karena dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari kalangan nonmuslim.

K.H. Abdul Halim tidak mengalah terhadap penentangan itu, melainkan terus berusaha mengembangkan sistem pendidikan yang dikelola *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin*. Dengan tekadnya yang bulat dan dengan mendapat bantuan dari para penghulu serta kemunduran yang dialami oleh pesantren tradisional, keberadaan *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin* pada akhirnya dapat diterima secara baik oleh para guru agama. Untuk ini ia menjalin hubungan dengan *Jam'iyat Khair* dan *al-Irsyad* di Jakarta.<sup>14</sup> K.H. Abdul Halim memiliki hubungan personal yang sangat baik dengan O.S. Tjokroaminoto. Hubungan baik itu memang tidak dapat dilepaskan dari status K.H. Abdul Halim sebagai anggota Sarekat Islam. Dalam suatu kesempatan, pemimpin utama Sarekat Islam itu menyarankan kepada K.H. Abdul Halim untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui secara hukum keberadaan *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin*. Saran tersebut dibicarakan dengan rekan-rekannya di *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin*. Mereka sepakat untuk mengajukan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin* diakui secara hukum. Namun demikian, pengajuan tersebut secara resmi diajukan oleh K.H. Abdul Halim setelah nama *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin* diubah menjadi Persjarikatan Oelama (PO). Perubahan

---

<sup>13</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 37-38.

<sup>14</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 38-39

nama itu mendapat dukungan penuh dari O.S. Tjokroaminoto dan membantunya agar Persjarikatan Oelama segera diakui secara hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda.<sup>15</sup>

#### d. Persjarikatan Oelama

Organisasi tersebut yang kemudian diganti menjadi Persjarikatan Oelama, diakui secara hukum oleh pemerintah pada tanggal 21 Desember 1917, Rechtspersoon (pengesahan pemerintah) No. 43 dari Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Strium atas keberadaan Persjarikatan Oelama sebagai sebuah organisasi. Aktivasnya dijamin oleh hukum, meskipun baru sebatas untuk daerah Majalengka saja.<sup>16</sup> K.H. Abdul Halim mendapat dukungan penuh dari O.S. Tjokroaminoto, Presiden Sarikat Islam.<sup>17</sup> Pada tahun 1924 organisasi tersebut secara resmi meluaskan daerah operasinya ke seluruh Jawa dan Madura, dan pada tahun 1937 ke seluruh Indonesia. Dalam kenyataannya Persjarikatan Oelama tetap merupakan sebuah organisasi daerah Majalengka.<sup>18</sup> Cabang-cabang Persjarikatan Oelama yang berhasil didirikan yaitu di Semarang, Pamekasan, Purwokerto (Banyumas), dan Tebing Tinggi (Sumatera).<sup>19</sup>

Pada awal keberadaannya, Persjarikatan Oelama diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Majalengka sehingga menunjukkan perkembangan cukup menggembirakan. Dalam kurun

---

<sup>15</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 40.

<sup>16</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 40.

<sup>17</sup> Tim Penyusun (ENI), *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997), p. 310.

<sup>18</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia...*, p. 82

<sup>19</sup> Momon Lentuk, *Mengenang Perjuangan dan Kepahlawanan K.H. Abdul Halim...*, p. 55.

waktu 1917-1924, Persjarikatan Oelama (PO) berhasil membuka cabang di Jatiwangi, Maja, Talaga, Kadipaten, Dawuan, Sukahaji, Bantarujeg, Rajagaluh, Jatitujuh, dan Leuwimunding.<sup>20</sup>

Selain berusaha mendirikan cabang di luar Majalengka, PO pun memiliki beberapa organisasi pemuda dan perempuan. Organisasi onderbouw PO tersebut dibentuk sebagai wadah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemuda dan kaum perempuan. Terkait dengan hal itu, tahun 1929 PO mendirikan Hizbul Islam Padvinders Organisatie (HIPO), sebuah organisasi kepanduan yang menampung dan menyalurkan aktivitas para pemuda di lingkungan PO. Selain itu, pada 1932 PO pun mendirikan Perikatan Pemoeda Islam (PPI) yang kemudian diubah menjadi Perhimpoean Pemoeda Persjarikatan Oelama Indonesia (P3OI). Tidak lama kemudian, PO pun membentuk Perhimpunan Anak Perempuan Persjarikatan Oelama.<sup>21</sup>

Untuk memberdayakan kaum perempuan, PO mendirikan Fatimijah tahun 1930. Nama organisasi tersebut diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kegigihannya dalam menegakkan agama Islam.<sup>22</sup> Nama tersebut menjadi inspirasi agar kaum perempuan di lingkungan PO memiliki semangat perjuangan yang tinggi sebagaimana dicontohkan oleh Ibunda Sayyiduna Hasan dan Husen itu. Oleh Hoofdbestuur PO, Fatimijah ditugasi untuk mengelola rumah yatim piatu dan tugas-tugas lainnya yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat

---

<sup>20</sup> Nina Herlina Lubis, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, (Jawa Barat: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011), p. 281.

<sup>21</sup> Nina Herlina Lubis, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat...*, p. 281.

<sup>22</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia...*, p. 82.



kewanitaan.<sup>23</sup> Menurut Akim Fatimijah hampir sama dengan Persjarikatan Oelama, yaitu bergerak pada bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Untuk pertama kalinya, Fatimijah dipimpin oleh Kusijah Soedjarwo. Dengan hadirnya Fatimijah mulai diadakan pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, dan kongres secara periodik.<sup>24</sup>

Di bidang pendidikan, PO mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan melakukan pembaharuan dalam sistem pengajarannya. Berbagai lembaga pendidikan sekolah untuk berbagai jenjang didirikan oleh Persjarikatan Oelama. Pada tahun 1919, Persjarikatan Oelama mendirikan Madrasah Mu'allimin (Darul Ulum) yang difungsikan sebagai sekolah untuk mencetak guru (*kweekschool*).<sup>25</sup> Untuk menjadi seorang guru, santri di madrasah ini harus menempuh pendidikan selama lima tahun. Sementara itu, di bidang ekonomi, PO berupaya untuk mengoptimalkan peranan koperasi untuk memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi dipilih PO sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat karena di dalamnya terkandung jiwa persaudaraan dan persatuan sesama anggotanya.<sup>26</sup>

#### e. Perikatan Oemat Islam (POI)

Pada tahun 1942, Pemerintah Militer Jepang membekukan PO karena anggaran dasarnya dipandang tidak sejalan dengan tujuan politik Jepang. Hampir dua tahun, PO tidak melakukan aktivitas apapun sampai K.H. Abdul Halim menerima dan memasukkan tujuan-tujuan

---

<sup>23</sup> Nina Herlina Lubis, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat...*, p. 281-282.

<sup>24</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam...*, p. 108.

<sup>25</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 48.

<sup>26</sup> Nina Herlina Lubis, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat...*, p. 283.

Persemakmuran Asia Timur Raya ke dalam anggaran dasar PO sekaligus mengubah nama organisasi menjadi Perikatan Oemat Indonesia (POI). Perubahan-perubahan tersebut mendorong Pemerintah Militer Jepang mengakui secara hukum eksistensi POI sejak tanggal 1 Februari 1944. Pada 25 Mei 1944, POI diterima sebagai bagian dari Masyumi karena dipandang sebagai organisasi yang memiliki perbedaan dengan organisasi Islam lainnya yang lebih dahulu duduk di Masyumi. Eksistensi POI berakhir tahun 1952 seiring dengan keputusannya untuk melakukan fusi dengan organisasi Persatoean Oemat Islam Indonesia (POII) yang sebelumnya bernama *Al-Ittihadijatoel Islamijjah* (AII).<sup>27</sup>

f. Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia menjadi Persatuan Ummat Islam

Persahabatan antara K.H. Abdul Halim dari Perikatan Ummat Islam dengan K.H. Ahmad Sanusi<sup>28</sup> dari Persatuan Ummat Islam Indonesia telah berlangsung lama. Undangan K.H. Ahmad Sanusi kepada K.H. Abdul Halim pada Maret 1935 untuk menghadiri kongres *Al-Ittihadijatoel Islamijjah* dan memberikan ceramah pada pembukaan acara itu menunjukkan mereka telah saling mengenal. Menurut Wanta kedekatan hubungan dan persahabatan antara K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi selanjutnya dapat dipahami dari kebersamaan mereka ketika bersama-sama menjadi pengurus Majelis Islam A'la

---

<sup>27</sup> Nina Herlina Lubis, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat...*, p. 283-284.

<sup>28</sup> K.H. Ahmad Sanusi dilahirkan pada malam Jumat, 12 Moeharam 1306/ 18 September 1888 di Tjantajan, kabupaten Sukabumi. Gunseikanbu. 2602/ 1942. *Pendaftaran Orang Jang Terkemuka Jang Ada di Djawa*, eks Arsip Gunseikanbu Cabang I, Pegangsaan Timur 36 Jakarta.

Indonesia, anggota Majelis Syuro Muslimin Indonesia, anggota Cuo Sangi In, dan duduk berdampingan dalam Dokuritu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) di Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, mereka masih saling bertemu baik di Jakarta maupun di Yogyakarta.<sup>29</sup>

Dari kedekatan hubungan dan persahabatan antara K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi, di tengah kesibukan keduanya, diduga mulai dibicarakan upaya fusi kedua organisasi yang mereka pimpin. Keinginan tersebut dilandasi oleh adanya kesamaan orientasi dan gerakan, yaitu: pertama, organisasi Perikatan Ummat Islam dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia berdasarkan Islam dan bertujuan menghidupkan ajaran-ajaran Islam. Kedua, Perikatan Ummat Islam dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia berkeinginan adanya persatuan di kalangan umat Islam Indonesia yang lebih kokoh dan kuat dalam *jamaah dan imamah*.<sup>30</sup> Namun ketika rencana mengenai nama, bentuk organisasi hasil fusi, rancangan (konsep) kepengurusan, waktu dan tempat pelaksanaan fusi disepakati, sejarah belum berpihak kepada upaya mereka. K.H. Ahmad Sanusi wafat pada hari ahad malam, 15 Syawal 1369/ 31 Juli 1950 dalam usia 63 tahun di Gunung Puyuh, Sukabumi.<sup>31</sup>

Sepeninggal K.H. Ahmad Sanusi maka K.H. Abdul Halim menerima surat kiriman dari Syamsuddin di saat itu menjabat Duta

---

<sup>29</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 180.

<sup>30</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 181.

<sup>31</sup> Suracman, *K.H. Abdul Halim Iskandar dan Penggerakannya*, (Majalengka: PUI, 1862), p. 25.

Besar RI di Pakistan.<sup>32</sup> Surat yang dikirim Syamsuddin kepada K.H. Abdul Halim di Santi Asromo Majalengka baru diterima bersamaan dengan siaran radio yang mengumumkan Syamsuddin telah meninggal dunia di CBZ Jakarta.<sup>33</sup> Oleh karena itu, K.H. Abdul Halim belum bertemu dengan Syamsuddin sebagaimana diharapkan pada suratnya. Berbekal surat dari Syamsuddin, K.H. Abdul Halim dan Pengurus Besar Perikatan Ummat Islam mulai mengadakan pertemuan internal dengan agenda perlunya fusi antara Perikatan Ummat Islam dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia.<sup>34</sup> Setelah diperoleh kesepakatan internal, Pengurus Besar Perikatan Ummat Islam melakukan korespondensi dengan Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam Indonesia. Keduanya mengadakan pertemuan di Sukabumi. Selanjutnya, guna mematangkan rencana fusi, para pucuk pimpinan PUI dan PUII mengadakan dua kali pertemuan lanjutan di Bandung, tepatnya di Firma Mustika Jl. Cicendo, Bandung di rumah Fadil Dasoeki, salah seorang anggota PUI. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 4-5 Agustus 1951, dan pertemuan kedua dilaksanakan pada 26-27 November 1951.<sup>35</sup>

Pada tanggal 5 April 1952/ 9 *Rajab* 1371, hari yang direncanakan dan ditunggu kedua belah pihak tiba. Bertempat di gedung Nasional Bogor tampak hadir delegasi (perwakilan), anggota,

---

<sup>32</sup> Suracman, *K.H. Abdul Halim Iskandar dan Penggeraknya...*, p. 25.

<sup>33</sup> Syamsuddin atau Rd. Mr. Sjamsoeddin lahir pada 1 Juni 1908 di Sukabumi. Jabatan terakhirnya di pemerintahan adalah Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan. Sementara dalam kepengurusan Persatuan Ummat Islam Indonesia sebagai Wakil Ketua. Ia meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta pada Oktober 1950, dalam usia 48 tahun. Gunseikanbu. 2602/ 1942. *Pendaftaran Orang Jang Terkemuka Jang Ada di Djawa*, eks Arsip Gunseikanbu Cabang I, Pegangsaan Timur 36 Jakarta.

<sup>34</sup> Suracman, *K.H. Abdul Halim Iskandar dan Penggeraknya...*, p. 24.

<sup>35</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 156-157.

dan simpatisan PUI dan PUII. Delegasi PUI terdiri dari: Djunaidi Mansur (ketua), Sudjono Hardjosudiro, Moh. Wahjuddin, Ahmad Nawawi, Bunjamin Ma'ruf, Abdul Azis Halim, M. Sukatma, Afandi Ridwan, Moh. Akim, dan S. Wanta (Anggota). Delegasi PUII terdiri dari: Utom Sumaatmadja (Ketua), A. Zarkasji Sanusi, M. Mitraatmadja, Moch. Maksum, A. Badri Sanusi, Sumantri, Sholeh, Dadun Abdulqohar, Abdulghani, dan Yusuf Iskandar (Anggota). Para delegasi dari masing-masing organisasi berunding dalam suasana *ukhuwah* (persaudaraan). Pada tanggal 6 April 1952, acara puncak perhelatan fusi antara PUI dan PUII segera dimulai. Panitia memulai acara dengan Tabligh Akbar yang disampaikan oleh A. Zarkasyi Sanusi. Selesai Tabligh Akbar, Moh. Wahyuddin menguraikan langkah-langkah perjuangan mendatang dan latarbelakang terjadinya persatuan (fusi). Setelah itu Afandi Ridwan naik ke atas podium, ia membacakan Naskah fusi.<sup>36</sup>

Dari fusi yang dilakukan muncul nama yang di setujukan yang bernama Persatuan Ummat Islam yang sekaligus juga rapat fusi memutuskan bahwa K.H. Abdul Halim sebagai pimpinan resmi hasil fusi. Dalam kehidupan perjuangan K.H. Abdul Halim menunjukkan sebuah kesuksesan besar yang pada faktanya semua itu berkat kegigihan, kejujuran, dan kesabaran yang dimiliki K.H. Abdul Halim dalam berjuang memperjuangkan Islam dan kemerdekaan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 184.

<sup>37</sup> Momon Lentuk, *Mengenang Perjuangan dan Kepahlawanan K.H. Abdul Halim*..., p. 94-95.

## B. Perkembangan Persatuan Ummat Islam Tahun 1952-1962

Pada perkembangannya baik Perikatan Ummat Islam maupun Persatuan Ummat Islam Indonesia mulai mendirikan organisasi-organisasi pendukung (organisasi sayap atau badan otonom) guna mewadahi aspirasi para pemuda, wanita, pelajar, dan simpatisan lainnya, serta mulai menerbitkan majalah periodikal regular, buku, dan kelengkapan organisasi lainnya. Pada tahapan tersebut, Persatuan Ummat Islam sama seperti organisasi Islam modern lainnya.<sup>38</sup>

Pada Mukhtamar PUI ke-1 yang berlangsung dari 10-14 Oktober 1952, terjadi fusi antara Fathimiyah (Wanita Perikatan Ummat Islam) dengan Zainabiyah (Wanita Persatuan Ummat Islam Indonesia) menjadi Wanita Persatuan Ummat Islam. Posisi Wanita Persatuan Ummat Islam dalam struktur organisasi berada pada majelis tersendiri, yaitu Majelis Wanita.<sup>39</sup> Mukhtamar PUI ke-1 juga menugaskan kepada Pengurus Besar untuk melakukan perbaikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, dan pembuatan Lambang Persatuan Ummat Islam.<sup>40</sup>

Kedua, pada Mukhtamar PUI ke-2 yang berlangsung dari 27-31 Agustus 1954, terjadi penyempurnaan Anggaran Dasar pada pasal Tujuan Organisasi, menjadi berbunyi: “menuju terlaksananya *Syariat Islamiyah Madzhab Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah*”.<sup>41</sup> Untuk mencapai tujuan itu, PUI akan bergerak di bidang peribadatan, pendidikan Islam,

---

<sup>38</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 187.

<sup>39</sup> Suracman, *K.H. Abdul Halim Iskandar dan Penggerakannya*..., p. 26.

<sup>40</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 188.

<sup>41</sup> Momon Lentuk, *Mengenang Perjuangan dan Kepahlawanan K.H. Abdul Halim*..., p. 134.

dan dakwah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam.<sup>42</sup>

Ketiga, pada Mukhtamar ke-3 yang berlangsung 15-20 Mei 1957. Pada Mukhtamar PUI ke-3, seorang peserta Mukhtamar yaitu Sujono Haryosudiro menyampaikan usulan agar PP PUI segera mengajukan permohonan berbadan hukum. Mengingat semua persyaratan sudah dianggap mencukupi, maka pemerintah melalui Menteri Kehakiman mengukuhkan status badan hukum bagi Persatuan Ummat Islam dengan ketetapan Menteri Kehakiman No. JA 5/ 86/ 23 tanggal 10 September 1958.<sup>43</sup>

Keempat, pada Mukhtamar ke-4 yang seharusnya dilaksanakan pada 1959/ 1960, baru terlaksana pada 29 Juli-1 Agustus 1964 di Bandung. Pada tahun-tahun itu, selain terjadi gejolak politik nasional, juga disusul Abdoel Halim Wafat pada 1962. Pada Mukhtamar ke-4 menghasilkan pembaruan pucuk pimpinan Pengurus Besar dari A. Zarkasyie Sanusi ke A. Aziz Halim. A. Zarkasyie Sanusi kemudian diangkat menjadi ketua Dewan Penasehat menggantikan K.H. Abdul Halim. Mukhtamar PUI ke-4, juga menambah satu majelis, yaitu: Majelis Ilmu Pengetahuan dan Perguruan Tinggi.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kyai Kholid Fadlullah (Cucu K.H. Abdul Halim), didapat informasi bahwa setiap kali mengadakan

---

<sup>42</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim...*, p. 163.

<sup>43</sup> Momon Lentuk, *Mengenang Perjuangan dan Kepahlawanan K.H. Abdul Halim...*, p. 135.

<sup>44</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 189.

Muktamar, K.H. Abdul Halim yang selalu menjadi pemimpin sampai pada akhirnya ia menjadi penasihat.<sup>45</sup>

### **C. Peran Persatuan Ummat Islam dalam Sosial Kemasyarakatan di Jawa Barat**

Seperti organisasi massa lainnya di Indonesia, Persatuan Ummat Islam menyakini bahwa pendidikan dan pengajaran yang berorientasi keagamaan lebih diminati oleh kaum Muslim. Menurut Wanta sebelum dilaksanakan Muktamar PUI ke-2 di Sukabumi, pada 13-15 Juni 1954 di Majalengka diselenggarakan Konferensi Pendidikan PUI ke-1. Konferensi Pendidikan PUI ke-1 mendapat sambutan luar biasa dengan hadirnya sejumlah utusan cabang, pimpinan sekolah/ madrasah, serta para guru Persatuan Ummat Islam.<sup>46</sup>

Dalam suatu kegiatan pendidikan yang merupakan suatu sistem, dasar pendidikan dan yang memberi landasan untuk berpijak, memberi warna bagi perbuatan dan arah serta tujuan kemana usai itu dibawa.<sup>47</sup> Konferensi Pendidikan dan Pengajaran PUI ke-1 menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut: pertama, tujuan pendidikan Persatuan Ummat Islam, adalah: a) manusia dewasa yang dalam hidup dan kehidupannya mengabdikan dan mencari ridho Allah, b) ikhlas dalam segenap perbuatannya, c) manusia pelajar yang mampu dan bersedia untuk memperbaiki diri dan lingkungan serta menuju ke arah yang lebih baik dalam segala lapangan, dengan kata lain ia merupakan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kyai Kholid Fadlullah, Jl. Pancuran Utara 1 No. 140 Cirebon 45122, 07 Mei 2018, pukul 11.00.

<sup>46</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 269.

<sup>47</sup> S. Wanta, *Tujuan dan Pola Dasar Pendidikan PUI*, (Majalengka: PP PUI, 1986), p. 11.



seorang kader umat, d) mampu membentuk suatu komunikasi yang harmonis secara vertikal dengan Allah ataupun secara horizontal antar sesama manusia dan lingkungannya, bangsa dan negara dengan dasar mahabbah (cinta kasih sayang).<sup>48</sup> Kedua, Program Kerja Pendidikan Persatuan Ummat Islam, meliputi: a) adanya pembagian tugas dan kewajiban antara Inpeksi (Pengawas), Sekretariat, dan Penyelenggara Sekolah atau Madrasah sesuai tenaga dan kemampuan tersedia, b) menentukan rencana pelajaran (kurikulum) Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Persatuan Ummat Islam, c) menetapkan rencana Madrasah / Sekolah tingkat Lanjutan, yaitu rencana mendirikan SGI (Sekolah Guru Islam) dengan lama studi 6 tahun, dan d) mengesahkan Tata tertib Majelis Pengajaran, meliputi: 1) penetapan hari libur sekolah, 2) memperbaiki mutu guru-guru PUI, dan 3) stabilitas usaha keuangan Sekolah/ Madrasah.<sup>49</sup>

Pada tahun 1954, Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam juga mengeluarkan rencana pelajaran Sekolah Rakyat (SR) setingkat Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pelajaran 6 tahun. Tujuan Sekolah rakyat Persatuan Ummat Islam adalah mengeluarkan putra-putri Indonesia supaya menjadi muslim yang berpendidikan dan berpengalaman yang sewajarnya sesuai dengan tingkatannya. Menurut Wanta pada tanggal 5 April 1956, perkembangan pendidikan yang dikelola Persatuan Ummat Islam menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Kegembiraan itu, di antaranya: pertama, Persatuan Ummat Islam di Bogor berhasil

---

<sup>48</sup> S. Wanta, *Tujuan dan Pola Dasar Pendidikan PUI...*, p. 14.

<sup>49</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 270-271.

mendirikan gedung PGA (Pendidikan Guru Agama) dan Pesantren Sirna Bhakti Persatuan Ummat Islam yang cukup representatif, tepatnya di Jalan Bondongan di bawah asuhan Moh. Maksoem. Kedua, Persatuan Ummat Islam berhasil membeli lahan yang letaknya di Jalan Raya Barat Majalengka, seluas 989 M. di atas tanah itu kemudian dibangun gedung Madrasah Percobaan (Madrasah Wajib Belajar) 5 lokal.<sup>50</sup>

Pada tahun 1958, Persatuan Ummat Islam mendirikan Madrasah Diniyah (Ibtidaiyah) 6 tahun. Pada sekolah itu, pelajaran agama/ bahasa Arab lebih banyak dari Sekolah Rakyat 6 tahun. Selain itu, masih pada tahun yang sama, Persatuan Ummat Islam juga mendirikan Madrasah Pertanian dengan lama pelajaran 4 tahun (empat kelas). Perhatian Persatuan Ummat Islam dalam perbaikan pendidikan tidak berhenti sampai di situ. Meskipun antara 1958 hingga akhir 1962 terjadi beberapa peristiwa pahit bagi Persatuan Ummat Islam, pendidikan masih menjadi prioritas organisasi. Pada 10-14 November 1962 di Majalengka dilaksanakan Konferensi Pendidikan dan Pengajaran PUI ke-3. Konferensi itu dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil keputusan Konferensi Pendidikan dan Pengajaran ke-2. Dari evaluasi tersebut diketahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan Persatuan Ummat Islam.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kyai Kholid Fadlullah (Cucu K.H. Abdul Halim), didapat informasi bahwa Persatuan Ummat Islam

---

<sup>50</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 272-275.

<sup>51</sup> Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 280.

di masa hidupnya K.H. Abdul Halim, Persatuan Ummat Islam hanya bergerak di Bidang Pendidikan, Dakwah, dan Sosial. Di dalam bidang Sosial K.H. Abdul Halim mendirikan rumah yatim piatu dan rumah jompo.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kyai Kholiq Fadlullah, Jl. Pancuran Utara 1 No. 140 Cirebon 45122, 07 Mei 2018, pukul 11.00.